

**EVALUASI PROGRAM SEMBAKO DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

Rediva Nur Meilya

NPP. 31.0476

Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: meilyarediva@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Anwar Rosshad, S.H, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author's focus in this research is on the implementation of the Basic Food Program in Sokaraja District where there is a discrepancy in the number of Integrated Social Welfare Data (DTKS) with the actual number of Beneficiary Families (KPM) who received assistance. Then there was abuse in the use of aid carried out by one of the KPMs who did not use the aid properly. **Purpose:** This research aims to provide an evaluation and description regarding the implementation of the Basic Food Program in improving the welfare of the poor in Sokaraja District, Banyumas Regency and provide an overview of the efforts made to optimize the implementation of the Basic Food Program. **Method:** This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and data triangulation. The analysis of this research uses Evaluation theory according to William Dunn which consists of 6 (six) dimensions. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that there are still obstacles in implementation, namely problems in updating data on basic food program recipients by village operators in DTKS, lack of understanding by village operators regarding poverty criteria, there are parties who take advantage of opportunities in the distribution process, and there are KPMs who abuse in utilizing aid. To overcome these obstacles, there are several efforts from the program implementers, namely deepening the KPM data for the Basic Food Program in a more concrete way, creating time limits and age ranges for recipients of the basic food program, and posting a list of names of basic food program recipients at the sub-district and village offices and installing stickers. recipients of the basic food program at the recipient's home. **Conclusion:** Evaluation of the implementation of the Basic Food Program in improving the welfare of the poor in Sokaraja District, Banyumas Regency, can be said to have gone well but not yet optimally, which can be seen from the dimensions of efficiency, adequacy, responsiveness and distribution, and its implementation is in accordance with the program mechanism. However, apart from that, there are still several obstacles that can be seen from the dimensions of effectiveness and accuracy. To optimize the implementation of this program, it is possible to increase the control function and add additional social assistants in the implementation and utilization of the Basic Food Program by TKSK which must be carried out periodically and on a schedule, update village population data for residents who experience population events or important events, and program implementers should can increase the frequency of implementation of Coordination Meeting (Rakor) activities for implementers of the Basic Food Program as a follow-up to discussions regarding barriers and constraints in implementing distribution that can be implemented by agencies, sub-districts and villages.

Keywords: *Evaluation, Policy, Basic Food Program, Community Welfare*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fokus penulis dalam penelitian ini yaitu pada pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan Sokaraja dimana adanya ketidaksesuaian jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan jumlah realisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan. Kemudian adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh salah satu KPM yang tidak mempergunakan bantuan dengan semestinya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi maupun mendeskripsikan terkait pelaksanaan Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas serta memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Sembako. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta triangulasi data. Analisis penelitian ini yaitu menggunakan teori Evaluasi menurut William Dunn yang terdiri dari 6 (enam) dimensi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang didapatkan penulis pada penelitian ini masih adanya kendala dalam pelaksanaan yaitu permasalahan dalam pembaruan data penerima Program Sembako oleh operator desa yang ada di DTKS, kurangnya pemahaman operator desa mengenai kriteria kemiskinan, ada pihak yang memanfaatkan kesempatan pada proses penyaluran, dan terdapat KPM yang menyalahgunakan dalam pemanfaatan bantuan. Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut maka terdapat beberapa upaya dari pihak pelaksana program yaitu pendalaman data KPM Program Sembako yang lebih konkrit, membuat batasan waktu dan rentang usia bagi penerima program sembako, dan memasang daftar nama penerima program sembako di kantor kecamatan maupun kantor desa serta pemasangan stiker penerima program sembako di rumah penerima. **Kesimpulan:** Evaluasi pelaksanaan Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal yang dapat dilihat dari dimensi efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan pemerataan serta pelaksanaannya sudah sesuai dengan mekanisme program. Namun disamping itu masih terdapat beberapa kendala yang dapat dilihat dari dimensi efektivitas dan ketepatan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini maka dapat dilakukan peningkatan fungsi kontrol serta penambahan pendamping sosial dalam pelaksanaan serta pemanfaatan Program Sembako oleh TKSK harus dilakukan secara berkala dan terjadwal, melakukan pembaruan data kependudukan desa bagi warga yang mengalami peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting, dan untuk pelaksana program hendaknya dapat meningkatkan frekuensi dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) bagi pelaksana Program Sembako sebagai tindak lanjut pembahasan mengenai hambatan maupun kendala dalam pelaksanaan penyaluran yang dapat dilaksanakan oleh dinas, kecamatan, maupun desa.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Program Sembako, Kesejahteraan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dimana masih menghadapi masalah kemiskinan yang merupakan permasalahan sosial yang bersifat global. Hasil survei dari

lembaga riset Ipsos Global, *What Worries The World* pada 25 November sampai 9 Desember 2022 bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan masalah yang paling dikhawatirkan di Indonesia pada tahun 2022. Swanson (2001) dalam buku Suharto (2013:6) memperlihatkan “kemiskinan memiliki keterkaitan terhadap kekurangan materi, penghasilan rendah, serta kesulitan memenuhi kebutuhan sosialnya”. Kemiskinan salah satunya berkaitan dengan kesulitan memenuhi kebutuhan sosialnya dalam keseharian dan ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Pemerintah sebagai personifikasi Negara untuk mewujudkan amanah konstitusi dalam upaya menyejahterakan rakyat (Thahir,2019). Kemudian dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 pada pasal 4 mencantumkan cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah sebagai alat negara yang menjalankan pemerintahan harus dapat mengatasi masalah kemiskinan untuk menjamin kesejahteraan sosial. Untuk itu pemerintah yang memiliki kekuasaan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini dengan mengeluarkan adanya bantuan sosial secara tunai maupun non tunai. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin dengan memberikan bantuan sosial yaitu Program Sembako. Dimana Program Sembako merupakan program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Tujuan Program Sembako dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 dalam Pasal 2 yaitu untuk membantu pengeluaran KPM Program Sembako dalam pemenuhan kebutuhan pangan, membantu masyarakat yang masuk pada kriteria kemiskinan atau hidup dengan tidak layak maupun memiliki kriteria dalam masalah sosial, serta untuk menyerahkan pilihan maupun kendali kepada KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan sehari-harinya.

Pelaksanaan penyaluran Program Sembako tahun 2023 telah terjadi transisi aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sehingga dalam aturan baru tersebut mengatur beberapa perbedaan dalam bentuk barang yang diterima KPM, mekanisme penyaluran Program Sembako, serta pengalihan fungsi *e-warong* yang sudah tidak ada dalam aturan yang terbaru karena mekanisme yang sudah berbeda dengan tahun sebelumnya. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Bank Mandiri dan Pos Indonesia sebagai bank penyalur dan pos penyalur bagi KPM Program Sembako, mengingat Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dalam bentuk ATM atau Rekening Giro apabila melalui Pos Indonesia. Selain itu di setiap kecamatan terdapat satu pendamping sosial dalam hal ini yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas melaksanakan fungsinya di wilayah kerja mulai dari pendampingan, pemantauan, berkoordinasi dengan dinas sosial, edukasi dan sosialisasi, verifikasi dan validasi kelayakan KPM Penerima Program Sembako dan membantu pengusulan penggantian dan penghapusan KPM.

Pada pelaksanaan Program Sembako yang disalurkan dari Kementerian Sosial ke setiap daerah masih ditemukan adanya permasalahan maupun kendala salah satunya di Kabupaten Banyumas lebih fokusnya di Kecamatan Sokaraja. Pelaksana program telah melakukan validasi dan verifikasi DTKS terhadap penerima program atau KPM tetapi dari data tersebut masih ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap realisasi KPM Program Sembako. Berikut Tabel 1.1 menampilkan DTKS dan Realisasi KPM Program Sembako di Kecamatan Sokaraja Tahun 2019-2022.

Tabel 1.1
DTKS dan Realisasi KPM Program Sembako di Kecamatan Sokaraja
Tahun 2019-2022

Tahun	DTKS KPM	KPM Tidak Tepat Sasaran	Realisasi KPM
2019	4.553	27	4.580
2020	8.446	12	8.434
2021	11.598	219	11.379
2022	10.114	24	10.090

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Banyumas (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2022 DTKS KPM Program Sembako mengalami fluktuasi serta permasalahan yang terjadi dari tabel di atas yaitu berdasarkan verifikasi dan validasi data DTKS ditemukan ketidaksesuaian dengan realisasi KPM Program Sembako dengan artian bahwa adanya ketidaktepatan dalam pelaksanaan penyaluran Program Sembako terhadap KPM. Ketidaktepatan tersebut disebabkan karena pendataan yang berkaitan dengan KPM Program Sembako ada yang sudah sesuai maupun belum sesuai serta pembaruan data penerima.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program Sembako memang sudah lama berjalan selama 6 tahun di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2018, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya muncul beberapa permasalahan yang bertentangan dengan aturan mekanisme penyaluran Program Sembako. Permasalahan tersebut timbul dari pelaksana program maupun dari KPM selaku penerima bantuan. Beberapa contoh permasalahan tersebut antara lain : pertama, ketidaksesuaian data DTKS dengan realisasi KPM Program Sembako yang menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pelaksanaan penyaluran Program Sembako terhadap KPM. Ketidaksesuaian tersebut dapat ditimbulkan karena data penerima yang kurang relevan dimana data tersebut seharusnya diperbarui secara berkala sehingga meminimalisir adanya kesalahan data penerima. Kedua, adanya e-warong yang mengusahakan agar KPM dapat mengambil uang yang diterimakan untuk dapat diambil melalui Electronic Data Captur (EDC) yang ada di e-warong, sehingga KPM tidak menerima jumlah besaran uang bantuan yang sesuai karena sudah dipotong oleh pihak e-warong sebagai biaya tambahan untuk transaksi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran pada aturan terbaru yang mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 bahwa mekanisme penyaluran sudah tidak lagi melalui *e-warong*. Apabila KPM mengambil di kantor bank penyalur atau ATM maka besar jumlah uang yang diterimakan tidak akan mendapat potongan. Ketiga, terdapat KPM yang melakukan penyalahgunaan dana bantuan ini. Dimana mereka tidak membelanjakan atau memanfaatkan dana bantuan yang diterimanya untuk membeli bahan pangan tetapi justru digunakan untuk membeli atau memenuhi kebutuhan yang lainnya. Berdasarkan pada kondisi tersebut diperlukan suatu penelitian untuk menganalisis pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Banyumas lebih fokusnya di Kecamatan Sokaraja serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan program

sehingga dapat memberikan gambaran alternatif penyelesaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan penulis sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian oleh Mitha Tri Meilani, Aan Anwar Sihabudin, dan Arie Budiawan (2022) berjudul Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa berdasarkan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan menemukan bahwa pada setiap kriteria evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan dan penyalurannya BPNT ini belum dapat optimal secara keseluruhan (Meilani et al., 2022). Penelitian oleh Munawar Noor (2020) berjudul Effectiveness of Sembako Program Management for Poor Beneficiary Families (KPM) (Case Study in Banyumanik District of Semarang City) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Pengelolaan program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan KPM di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menemukan bahwa Pada seluruh tahapan program aspek manajemen perencanaan, pengorganisasian, komando, pengendalian dan koordinasi serta aspek efektivitasnya masih terdapat kelemahannya (Noor, 2020). Trino Ikhsan, Drs. Zulfan M. Hum dan Firdaus Mirza Nusuary M.A (2019) berjudul Hubungan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Gampong Kutatinggi, Aceh Barat Daya yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan antara Bantuan Pangan Non Tunai dengan kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Kutatinggi yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan pelaksanaan bantuan pangan non tunai terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Kutatinggi (Ikhsan et al., 2019). Rinda Mayang Sari, Arief Mulyawan Thoriq, dan Adriansyah (2022) berjudul Pengaruh Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Upaya Penanggulangan Masyarakat Prasejahtera di Desa Salem yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Salem, upaya penanggulangan masyarakat prasejahtera Desa Salem, dan pengaruh efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai terhadap upaya penanggulangan masyarakat prasejahtera di Desa Salem menemukan bahwa Efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh signifikan terhadap upaya penanggulangan masyarakat prasejahtera di Desa Salem (Sari et al., 2022). Ana Rosaliana dan Susi Hardjati (2019) berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas serta indikator yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menemukan bahwa adanya ketepatan waktu dalam proses penyaluran dana bantuan ini membuat efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo dilihat dari waktu pelaksanaan sejauh ini telah berjalan efektif (Rosaliana et al., 2019). Rifani Djaenal, J. E Kaawoan, dan Ismail Rachman (2021) berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore yang bertujuan menganalisis kebijakan bantuan pangan non tunai

(BPNT) Dinas Sosial untuk menanggulangi terkait dengan kemiskinannya menemukan bahwa masyarakat belum banyak mengerti tentang prosedur dalam pelaksanaan BPNT, fasilitas pendukung, serta jarak antara rumah KPM dengan e-warung yang sangat jauh tetapi semua pihak pelaksana dan pemerintah sudah terlibat dalam proses pelaksanaan penyaluran BPNT (Djaenal et al., 2021). Wike Oktapian (2020) berjudul Tata Kelola Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Gembor Kota Tangerang yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas mekanisme penyaluran serta faktor pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gembor menemukan bahwa Tata Kelola penyaluran BPNT belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dilihat dari penerapan prinsip-prinsip Good Government menurut Van Doeveren serta masih terdapat beberapa kendala seperti ketidaksesuaian dalam pedoman BPNT (Oktapiani, 2022). Nailah Putri, Cut Faradilla, SofyanSelly (2021) yang berjudul Analisis Kepuasan Penerima Bantuan Program Sembako Terhadap Pelayanan dan Harga Produk Bantuan Program Sembako di Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan dan harga produk bantuan Program Sembako di Kota Banda Aceh menemukan nilai kepuasan konsumen terhadap pelayanan dan harga produk bantuan Program Sembako pada beras dan telur diperoleh hasil CSI yang menyatakan sebanyak 68 responden puas mereka merasa cukup atas bantuan yang diberikan dan adanya bantuan ini tentu dapat mengurangi beban pengeluaran KPM (Putri et al., 2021). Felini O. Toporundeng, Wilson Bogar, Fitri H. Mamonto (2022) berjudul Implementasi Program Sembako Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa yang bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan dimana faktor-faktor determinan dalam penelitian ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi (Toporundeng et al., 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Beberapa penelitian di atas merupakan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Sembako, mulai dari evaluasi, efektivitas, implementasi, hubungan efektivitas penyaluran BPNT terhadap upaya penanggulangan masyarakat prasejahtera, tata kelola dilihat dari penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Penelitian di atas menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di sini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan teknis analisis data yang digunakan penulis yakni berupa kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dengan mengambil tema pembahasan yang sama yaitu Program Sembako, penulis lebih membahas mengenai evaluasi dari pelaksanaan Program Sembako sendiri. Dalam pelaksanaan Program Sembako tentunya berorientasi pada ketercapaian tujuan sesuai dengan pembentukan program, meskipun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya permasalahan maupun kendala. Untuk itu diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program guna mengetahui apakah Program Sembako sudah berjalan mencapai tujuan program atau sebaliknya maupun memberikan kemanfaatan kepada sasaran program. Kemudian evaluasi dibutuhkan juga untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan jalannya Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi maupun mendeskripsikan terkait pelaksanaan Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas serta memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengamati, mengidentifikasi dan memahami fakta kenyataan maupun fenomena yang terjadi serta melihat faktor apa yang berpengaruh pada saat pelaksanaan Program Sembako di lokus penelitian. Fenomena tersebut berupa nilai individu maupun anggapan mengenai kejadian yang dialami oleh kelompok sasaran. Kemudian penulis menguraikan hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan agar dapat menjelaskan serta meringkas data atau informasi dengan jelas sehingga nantinya dapat diambil garis besarnya terkait bagaimana kesesuaian pelaksanaan penyaluran Program Sembako di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dengan aturan maupun ketercapaian tujuannya. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan Teori Evaluasi William N. Dunn. Kemudian pada penelitian ini akan menggunakan teknik evaluasi *Comparative Before-After* dimana penulis melakukan analisis melalui pengukuran kondisi pelaksanaan program apakah memiliki dampak terhadap kelompok sasaran (yang dikenai program) atau tidak serta dengan membandingkan kondisi dari kelompok sasaran pada saat sebelum dan sesudah program berjalan. Informasi yang dikumpulkan pada penelitian ini terdapat dua sumber data penelitian terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh penulis dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara jenis semi struktur, dokumentasi, dan triangulasi dengan melakukan penggabungan dari beberapa teknik maupun sumber-sumber data yang sudah diperoleh agar nantinya data yang diperoleh akan lebih kuat dan dapat dipercaya. Untuk menentukan informan penelitian maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdapat 29 informan terdiri dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsospermades Kabupaten Banyumas, Camat Sokaraja, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sokaraja, Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Sokaraja, Pegawai Pos Penyalur, KPM Program Sembako Kecamatan Sokaraja, Bukan KPM Program Sembako Kecamatan Sokaraja, dan Operator Desa Karangkedawung. data yang sudah penulis dapatkan akan dianalisis melalui 3 tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi berdasarkan Teori Evaluasi William Dunn

Kriteria dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn mengemukakan bahwa terdapat 6 kriteria yang meliputi efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan (William N. Dunn, 2003). Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

Program Sembako maka penulis menggunakan beberapa kriteria yang ada tersebut untuk menganalisis serta upaya terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.

1. Efektifitas

Dimensi efektivitas menurut William N. Dunn (2003) dapat diukur dengan melihat dari suatu program yang dilaksanakan apabila sudah mencapai suatu tujuan awal penetapan program. Artinya efektivitas dapat tercapai apabila suatu program dalam pelaksanaannya telah mencapai tujuan dengan sasaran yang tepat serta memberikan nilai manfaat. Program Sembako belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif yang dapat dilihat dari ketercapaian tujuan dari Program Sembako ini, dimana tujuan tersebut tertuang dalam regulasi yang mengatur Pelaksanaan Program Sembako yaitu dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : Mengurangi beban pengeluaran KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar; Memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pada pelaksanaannya bahwa bantuan ini sudah dapat membantu bagi KPM Program Sembako tetapi bantuan ini belum secara menyeluruh didapatkan oleh masyarakat miskin yang menjadi sasaran program seperti yang telah disebutkan dalam tujuan program dalam aturan yang disebabkan karena pembaruan data KPM yang masih harus ditingkatkan sehingga bantuan ini dapat menyeluruh untuk masyarakat miskin maupun kehidupannya tidak layak serta masyarakat yang mengalami masalah sosial.

2. Efisiensi

Dimensi efisiensi menurut William N. Dunn (2003) mengarah pada jumlah usaha yang diperlukan suatu kebijakan atau program yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan atau program dalam mencapai efektivitas pada tingkat tertentu maupun tujuan yang telah ditetapkan. Artinya efisiensi mengarah pada usaha yang dilakukan suatu program baik itu dari pelaksana kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya berupa biaya, waktu, serta tenaga yang diperlukan dalam penyelenggaraannya. Alur penyaluran Program Sembako yang menjadi lebih singkat atau telah terjadi pemotongan sistem atau mekanisme penyaluran sehingga KPM dapat langsung mengambil dengan menggunakan KKS lewat bank penyalur atau ATM maupun pos penyalur tanpa harus melalui *e-warong*. Pihak Dinsospermades telah melakukan kerja sama dengan Bank Mandiri sebagai bank penyalur serta Pos Indonesia sebagai pos penyalur. Adanya kerja sama tersebut sebagai bank penyalur maka dari Bank Mandiri menyediakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kemudian dari pos penyalur juga menyediakan pembukaan rekening giro bagi KPM Program Sembako. Dengan kerja sama ini memudahkan Dinsospermades dalam memenuhi sarana maupun prasarana bagi KPM serta mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan.

Dalam mencapai suatu tujuan pelaksanaan Program Sembako maka dilakukan sosialisasi dan edukasi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Untuk itu Dinsospermades Kabupaten Banyumas memiliki kewajiban dalam melaksanakan edukasi serta sosialisasi kepada KPM Program Sembako. Salah satunya dari Dinsospermades Kabupaten Banyumas

sudah melakukan edukasi dan sosialisasi secara bertingkat, mereka juga menyediakan kegiatan pelayanan mobil keliling Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang melayani Cek DTKS serta konsultasi bantuan sosial.

JADWAL KEGIATAN PELAYANAN MOBIL KELILING LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

No.	Kecamatan	Tanggal	Waktu	Tempat
1.	Kedungbanteng	17 Oktober 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Kedungbanteng
2.	Cikongok	18 Oktober 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Cikongok
3.	Ajbararang	19 Oktober 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Ajbararang
4.	Baturaden	24 Oktober 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Baturaden
5.	Sumbang	25 Oktober 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Sumbang
6.	Sokaraja	26 Oktober 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Sokaraja
7.	Kalibagor	31 Oktober 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Kalibagor
8.	Banyumas	1 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Banyumas
9.	Paikraja	7 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Paikraja
10.	Rawalo	8 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Rawalo
11.	Tambak	9 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Tambak
12.	Lumbir	14 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Lumbir
13.	Gumelar	15 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Gumelar
14.	Wangon	16 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Wangon
15.	Pekuncen	21 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Pekuncen
16.	Kebasen	22 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Kebasen
17.	Somagede	23 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Somagede
18.	Kemranjen	28 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Kemranjen
19.	Sumpiuh	29 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Sumpiuh
20.	Jatilawang	30 November 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Jatilawang
21.	Purwojati	1 Desember 2023	Pukul 08.00 s.d selesai	Kantor Kecamatan Purwojati

An. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH
U. Asisten Pemerintahan dan Kesra



Dis. NUNGGY HARRY RACHMAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NP. 1987090211087021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (B2E), B2BV

Sumber: Dinsospermades Kabupaten Banyumas (2024)

Gambar 3.1
Jadwal Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Dengan adanya Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ini untuk memantau dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang didapatkan masyarakat seperti bantuan sosial. Namun terdapat beberapa penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak KPM dan e-warong sehingga ini harus menjadi perhatian untuk dilakukan pemantauan yang lebih.

3. Kecukupan

Dimensi kecukupan menurut William N. Dunn (2003) dapat dilihat dengan mengacu pada tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, serta kesempatan dari suatu kebijakan atau program dapat memecahkan masalah yang sedang terjadi. Artinya kecukupan dilihat dari penilaian terkait pencapaian tujuan maupun hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan atau program dapat memecahkan masalah yang sedang terjadi. Pada dasarnya tujuan dari Program Sembako untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan dengan arti bahwa Program Sembako ini harus dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan seluruh masyarakat miskin dan menjamin akan hal tersebut walaupun bantuan ini hanya bersifat sebagian. Pelaksanaan penyaluran Program Sembako sudah dapat memenuhi kriteria kecukupan bahwa program ini sudah dapat membantu meringankan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi disamping itu masih terdapat permasalahan kurangnya pelaksanaan pengecekan berkala untuk dilakukan

validasi dan verifikasi data menyebabkan data penerima yang kurang relevan sehingga menyebabkan terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*.

Pengecekan berkala untuk verifikasi dan validasi data dilakukan oleh TKSK yang ada di setiap kecamatan. Namun TKSK setiap kecamatan hanya satu orang dengan tanggung jawab yang diemban bukan hanya mengawasi pelaksanaan Program Sembako sehingga kurangnya pelaksanaan pengecekan berkala untuk dilakukan validasi dan verifikasi data di setiap desa kurang optimal yang menyebabkan data penerima yang kurang relevan sehingga menyebabkan terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*. Kemudian proses penginputan data dilakukan oleh operator desa yang memiliki tanggung jawab serta kewenangan dalam menginput data penerima. Data penerima bantuan tersebut sebelumnya juga telah di musyawarahkan pada saat Musyawarah Desa (Musdes) dan apabila sudah disetujui bersama maka akan menjadi hasil musdes dan setelah itu dilaporkan kepada dinas sosial. Namun dari pihak operator desa sendiri belum memahami secara jelas mengenai kriteria kemiskinan maupun kriteria yang berhak dan tidak berhak menerima bantuan seperti apa sehingga operator desa hanya memasukkan data penerima sesuai dengan persyaratan yang ada pada saat pengisian data untuk dimasukkan ke DTKS.

4. Perataan

Pada dimensi perataan menurut William N. Dunn (2003) sebagai analisis agar mengetahui kebijakan atau program dapat berakibat secara merata baik dari pelaksanaan maupun kebermanfaatannya yang diperoleh secara berkeadilan. Artinya dimensi perataan dilihat dari pelaksanaan program apakah dapat berjalan secara merata baik dari pelaksanaan maupun kebermanfaatannya yang diperoleh secara berkeadilan. KPM Program Sembako sebagai penerima manfaat harus dapat mengetahui terkait dengan tujuan pelaksanaan program dan secara umum KPM sudah mengetahui tujuan dari adanya bantuan ini. Program Sembako menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dikirimkan langsung kepada Bank Penyalur maupun Pos Penyalur dengan menggunakan rekening KKS. Besaran bantuan yang diberikan kepada KPM sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan disalurkan dari pusat yaitu sejumlah Rp200.000 per bulan. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kabupaten B anyumas bahwa waktu penyaluran Program Sembako pada tahun 2023 dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali.

Tabel 3.1

Penyaluran Program Sembako Tahun 2023

Penyaluran Program Sembako Tahun 2023	Penyaluran 2 bulan secara tunai melalui bank penyalur dan pos penyalur
1	2
Tahap I (Januari-Februari)	Rp400.000
Tahap II (Maret-April)	Rp400.000
Tahap III (Mei-Juni)	Rp400.000

1	2
Tahap IV (Juli-Agustus)	Rp400.000
Tahap V (September-Oktober)	Rp400.000
Tahap VI (November-Desember)	Rp400.000

Sumber: Dinsospermades Kabupaten Banyumas (2024)

Penyaluran yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali menjadikan KPM langsung menerima bantuan sejumlah Rp400.000. Namun dalam penyalurannya juga masih ditemukan terdapat KPM yang menyalahgunakan pemanfaatan bantuan ini untuk menyicil motor melalui bank penyalur. Serta terdapat *e-warong* yang tetap mengambil keuntungan dengan menarik KPM agar mengambil dana bantuan melalui *e-warong* sehingga pihak *e-warong* akan mendapatkan keuntungan dengan memotong dana bantuan untuk biaya administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kecurangan dalam pemanfaatan baik yang berasal dari penerima bantuan maupun pihak yang memanfaatkan.

5. Responsivitas

Dimensi responsivitas menurut William N. Dunn (2003) mengarah pada kemampuan kebijakan atau program dapat memberikan kepuasan akan kebutuhan maupun nilai pada kelompok masyarakat secara cepat dan efektif. Artinya responsivitas ini mengarah pada kemampuan program untuk memberikan respon terkait perubahan maupun kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif. Responsivitas menjadi hal yang penting karena kondisi masyarakat mengalami perubahan dengan kebutuhan berbeda, untuk itu respon dari masyarakat selaku penerima manfaat menjadi suatu hal yang diperlukan bagi pelaksana kebijakan maupun program. Disamping itu respon dari pelaksana program juga menjadi hal yang diperlukan.

Pelaksana program atau penyalur sudah responsif dengan berusaha sebaik mungkin demi kemudahan KPM dalam mengambil bantuan serta penyelesaian kendala. Salah satunya dari pihak pos penyalur yaitu Pos Indonesia bahwa dari pihak pos akan mengirimkan surat kepada KPM untuk dapat mengambil bantuan. Namun untuk mempermudah akses bagi KPM yang rumahnya jauh dari kantor pos maka dari pihak pos biasanya akan mendatangi kantor desa KPM yang jaraknya dekat dengan rumah KPM dan sebelumnya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pendamping serta pihak desa. Kemudian dari pihak pendamping baik itu dari TKSK atau Pendamping PKH yang membantu tugas TKSK akan melayani bantuan kepada KPM yang terkendala dalam pengambilan bantuan lewat bank penyalur maupun anjungan tunai yang disebabkan kartunya tertelan serta apabila terdapat keluhan dapat dibantu untuk dilayani.

Responsivitas selain dilihat dari pihak penyalur atau pelaksana Program Sembako dalam usaha untuk menjamin penyaluran bantuan maka respon dari KPM juga diperlukan. Pelaksanaan Program Sembako dari sasaran program yaitu KPM sudah merasa puas dengan adanya program ini dan manfaat yang dirasakan sudah sangat membantu meringankan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan mekanisme yang sekarang KPM juga merasakan lebih baik karena dengan penerimaan

dalam bentuk uang maka KPM dapat membeli kebutuhan pangan yang sesuai dengan kebutuhan serta dapat membeli kebutuhan dengan kualitas yang baik.

Dengan adanya Program Sembako ini sebagai bentuk responsivitas dapat dilihat dari bagaimana keadaan masyarakat setelah menerima bantuan yang berkaitan dengan produktivitas KPM Program Sembako. Namun dari pelaksana program melihat bahwa produktivitas sasaran program ini belum meningkat dengan kata lain masih terlihat sama atau seperti biasa dikarenakan bantuan ini sifatnya hanya sementara dan membantu untuk membeli sebagian pemenuhan kebutuhan pangan penerima.

6. Ketepatan

Dimensi ketepatan menurut William N. Dunn (2003) dianalisis dengan melihat hasil yang telah didapatkan dengan kesesuaiannya terhadap manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kebijakan maupun program mencapai suatu tujuan. Artinya dimensi ketepatan dapat dianalisis dengan melihat hasil yang telah didapatkan dengan kesesuaiannya terhadap manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kebijakan maupun program. Hasil pelaksanaan Program Sembako yaitu sesuai dengan tujuan dari program ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin. Artinya sasaran dari program ini yaitu ditujukan kepada masyarakat miskin maupun masyarakat yang kurang mampu, untuk itu diperlukan adanya pembaruan data penerima secara berkala. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomo 4 Tahun 2023 pada pasal 6 ayat (4) bahwa penghapusan KPM Program Sembako dilakukan apabila KPM tersebut sudah tidak memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang layak secara kemanusiaan, dan/atau sudah tidak memiliki kriteria masalah sosial. Namun pada kenyataannya dari hasil observasi yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa terdapat permasalahan dalam pembaruan data yang menyebabkan terdapat penerima yang tidak tepat sasaran. Hasil observasi yang penulis dapatkan dari pelaksanaan Program Sembako bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaktepatan sasaran. Dalam hal ini yang berkewajiban dalam merubah data untuk diperbarui yaitu petugas dari desa yang sudah ditunjuk sebagai operator. Operator seharusnya dapat melakukan pembaruan data apabila terdapat KPM yang sudah dinyatakan mampu atau meninggal dunia. Namun dari pihak operator desa tidak melakukan pembaruan data setiap bulan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari Kementerian Sosial maupun apabila ada penambahan usulan sesuai pengajuan masyarakat, lalu biasanya dari dinsos juga yang mengarahkan untuk melakukan *update* data. Apabila tidak ada berarti usulan atau arahan dari dinsos maka dari operator belum melakukan *update* data. Hal tersebut menyebabkan data yang ada terkadang belum sesuai dengan kondisi KPM yang terbaru. Kemudian proses pendaftaran atau pengusulan untuk dimasukkan ke dalam DTKS dapat dilakukan melalui dua jalan baik itu melalui desa maupun dilakukan melalui pengusulan mandiri melalui Aplikasi Cek Bansos. Proses pendaftaran atau pengusulan mandiri melalui aplikasi tersebut dilakukan bagi masyarakat yang paham serta dapat menggunakan teknologi secara canggih. Namun dengan pengusulan mandiri ini dapat menjadi celah terjadinya kecurangan yang menyebabkan terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*.

Ketepatan dalam pelaksanaan Program Sembako juga dilihat dari pelaksana program yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan program ini. Dari pihak pelaksana program yaitu dari pihak Dinsospermades Kabupaten Banyumas, pendamping sosial,

maupun bank penyalur dan pos penyalur dinilai sudah tepat dalam melakukan koordinasi dengan baik sehingga KPM dapat menerima informasi dengan cepat. Namun hanya operator desa yang dinilai kurang dalam melakukan pembaruan data penerima sehingga menyebabkan data yang kurang relevan. Kemudian pelaksanaan Program Sembako belum dapat sepenuhnya tepat dalam pelaksanaannya karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya pada data penerima yang terdapat ketidaksesuaian.

3. 2 Upaya yang Dilakukan dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Penyaluran Program Sembako kepada KPM

Pelaksana Program Sembako memberikan beberapa upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran program ini bagi KPM diantaranya yakni:

1. Pendalaman data KPM Program Sembako yang lebih konkrit.
2. Batasan waktu dan rentang usia bagi penerima program sembako.
3. Memasang daftar nama penerima program sembako di kantor kecamatan maupun kantor desa serta pemasangan stiker penerima program sembako di rumah penerima.

3. 3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan Sokaraja sudah berjalan baik tetapi belum dilaksanakan dengan optimal dikarenakan masih ditemukan adanya kendala pada saat pelaksanaan. Kendala yang ditemukan penulis sama halnya dengan temuan penelitian oleh Mitha, Aan, dan Arie (2022) menemukan dari analisis penelitian setiap dimensi dalam pelaksanaan dan penyalurannya masih terdapat kendala diantaranya pada dimensi efektivitas terjadi ketidaktepatan penerima bantuan serta aparat desa yang dinilai kurang dalam melakukan pembaruan data penerima. Kemudian hasil penelitian Felini, Wilson, dan Fitri (2022) menemukan bahwa Pemerintah Desa yang masih belum mengetahui secara terperinci kriteria KPM yang dapat diganti sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan pada hasil penelitian oleh Rindang, Arief, dan Adriansyah (2022) yang menunjukkan bahwa bantuan ini dapat menanggulangi apa yang terjadi pada Masyarakat prasejahtera yang berkekurangan dalam asupan makanan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa KPM Program Sembako sebagai penerima bantuan merasa sudah merasa sangat terbantu dalam membeli kebutuhan pangan.

3. 4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Program Sembako merupakan program yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pada pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan Sokaraja penulis menemukan permasalahan yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan Program Sembako dikarenakan pada tahun 2023 penyaluran bantuan sudah secara tunai oleh karena itu permasalahan yang terjadi yaitu kesulitan pengawasan pada saat pemanfaatan bantuan atau pembelanjaan bantuan oleh KPM yang dilaksanakan Pelaksana Program Sembako di Kecamatan Sokaraja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dapat

dikatakan sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari dimensi efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan pemerataan. Namun disamping itu masih terdapat beberapa kendala yang dapat dilihat dari dimensi efektivitas dan ketepatan.

Selain itu penulis juga menyarankan untuk mengatasi beberapa kendala yang menyebabkan pelaksana program ini menjadi belum berjalan dengan baik maka dapat dilakukan peningkatan fungsi kontrol serta penambahan pendamping sosial dalam pelaksanaan serta pemanfaatan Program Sembako oleh TKSK harus dilakukan secara berkala dan terjadwal, melakukan pembaruan data kependudukan desa bagi warga yang mengalami peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting agar terhindar dari *inclusion error* maupun *exclusion error* dalam data DTKS, serta meningkatkan frekuensi dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) bagi pelaksana Program Sembako sebagai tindak lanjut pembahasan mengenai hambatan maupun kendala dalam pelaksanaan penyaluran yang dapat dilaksanakan oleh dinas, kecamatan, maupun desa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu terkait dengan keterbatasan waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian ini hanya mengambil dua sampel yang berasal dari dua desa, yaitu Desa Karangkedawung dan Desa Wiradadi, pemilihan sampel tersebut didasari dengan beberapa pertimbangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terbatas yaitu pada proses evaluasi pelaksanaan program, untuk itu dibutuhkan penelitian lain yang dapat mendalami pengaruh penyaluran Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria maupun mengenai peran TKSK dalam melakukan pengecekan berkala untuk verifikasi serta validasi data penerima.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas baik kepala dinas maupun pegawainya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Pemerintah Kecamatan Sokaraja serta TKSK dan Pendamping PKH Kecamatan Sokaraja yang sudah memberikan bantuan dan mendampingi selama proses penelitian.
3. Masyarakat Kecamatan Sokaraja baik KPM Program Sembako maupun lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ana Rosaliana, Susi Hardjati. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya*. Universitas Pembangunan Nasional. *Public Administration Journal*. Volume 2, Nomor 2.

- Baharuddin Thahir. 2019. *Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>
- Felini O. Toporundeng, Wilson Bogar, Fitri H. Mamonto. 2022. *Implementasi Program Sembako Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*. Universitas Negeri Manado. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Volume 6, Nomor 1. 10.36312/jisip.v6i1.2733/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas. (2023). *DTKS dan Realisasi KPM BPNT di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023*
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/27/kemiskinan-dan-ketimpangan-sosial-jadi-masalah-paling-dikhawatirkan-di-indonesia>
- Mitha Tri Meilani , Aan Anwar Sihabudin , Arie budiawan. 2022. *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran*. Universitas Galuh
- Munawar Noor. 2021. *Effectiveness of Sembako Program Management for Poor Beneficiary Families (KPM) (Case Study in Banyumanik District of Semarang City)*” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Volume 4, Nomor 4 : 10026-10036. <http://www.bircu-journal.com/index.php/birci>
- Nailah Putri, Cut Faradilla, Sofyan. 2021. *Analisis Kepuasan Penerima Bantuan Program Sembako Terhadap Pelayanan dan Harga Produk Bantuan Program Sembako di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*. Volume 6, Nomor 4. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/JFP>
- Rifani Djaenal, J. E. Kaawoan, Ismail Rachman. 2021. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore*. *Jurnal Governance (1)*, Volume 1, Nomor 2
- Rinda Mayang Sari1, Arief Mulyawan Thoriq2, Adriansyah. 2022. *Pengaruh Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Upaya Penanggulangan Masyarakat Prasejahtera di Desa Salem*. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Volume 6, Nomor 1 : 70-76. <http://journal.masoemiversity.ac.id/index.php/maps>

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. Edisi 3. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Trino Ikhsan, Zulfan M., Firdaus Mirza Nusuary. 2019. *Hubungan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Gampong Kutatinggi, Aceh Barat Daya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Volume 4, Nomor 2. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP>

Wike Oktapiani. 2022. *Tata Kelola Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Gembor Kota Tangerang*. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, Volume 4, Nomor 3

William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edited by Muhadjir Darwin. Edisi 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

